



ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SAH OLEH NON PELANGGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR)

ABSTRACT

ABSTRAK

Arimasruri Zulkarnen, â„¢TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK

SECARA TIDAK SAH OLEH NON PELANGGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR)

(VI,55),pp.,bibl.,tabl.

Nurhafifah, S.H., M.Hum.

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa â€œsetiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)â€•. Sejak tahun 2016 sampai dengan Oktober 2017 PT. PLN Aceh Besar mencatat bahwa banyak terdapat tindak pidana penggunaan tenaga listrik secara tidak sah oleh non pelanggan di wilayah Aceh Besar.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan tenaga listrik secara tidak sah oleh non pelanggan, menjelaskan alasan tindak pidana tersebut tidak diproses ke pengadilan, dan meneliti/askan penegakan hukum serta hambatan penegak hukum terhadap tindak pidana penggunaan tenaga listrik secara tidak sah oleh non pelanggan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah tingkat perekonomian yang rendah, kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum, kurang tegasnya sanksi yang diterapkan. Alasan tidak diproses ke pengadilan adalah karena mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan. agar mendapat ganti rugi dan menghindari biaya yang besar dan waktu yang relatif lama. Upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum yaitu dengan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, mengambil barang bukti menyelesaikan dengan sanksi. Hambatan dalam penegakkan hukum ini disebabkan oleh kurangnya informasi terhadap tindak pidana penggunaan tenaga listrik secara tidak sah oleh non pelanggan dan pemeriksaan sulit dilakukan.

Disarankan kepada masyarakat untuk taat terhadap hukum, diharapkan berlakunya pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Ketenagalistrikan sehingga memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat kabupaten Aceh Besar.